

Anggaran Responsif Gender Tahun 2017-2019

di Desa Gelangsar, Kabupaten Lombok Barat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Tidak terkecuali pula di level desa. Sejak UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan desa dan mengelola anggaran pembangunan setiap tahunnya. Dan sebagaimana proses perencanaan pembangunan di tingkat supra desa, pemerintahan desa pun diwajibkan untuk melibatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat desa dan, dengan demikian seharusnya, perencanaan itu memberikan manfaat bagi kepentingan beragam kelompok tersebut. Sayangnya, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, seringkali masih ditemukan kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks kesenjangan itu, sejak tahun 2000 pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan untuk mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, praktek pengarusutamaan gender dijalankan dari level pusat sampai kabupaten/kota.

Di Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Perda ini menyatakan bahwa "... dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender" Pernyataan ini merupakan pengakuan tentang kondisi daerah yang masih membutuhkan "... strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan" Perda tentang PUG di Kabupaten Lombok Barat ini juga sekaligus sebuah upaya dan komitmen pemerintah daerah mendorong advokasi pengarusutamaan gender di dalam lingkup kabupaten, di semua level pemerintahan, dari tingkat kabupaten hingga desa.

Kewenangan desa-desa di Kabupaten Lombok Barat, termasuk Desa Gelangsar, yang diamanatkan oleh UU 6/2014 untuk melaksanakan keseluruhan proses pembangunan selaras dengan amanat Perda 3/2015 Kabupaten Lombok Barat. Melalui kedua aturan ini, pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat wajib menjalankan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berdasarkan prinsip adil dan setara gender (responsif gender). Sebagaimana disebutkan dalam Perda 3/2015 pasal 20, pemerintah desa menjalankan pengarusutamaan gender (PUG) di desa dengan cara menganggarkan program kegiatan PUG di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian, besarnya alokasi anggaran responsif gender dalam APBD Desa Gelangsar juga dapat menjadi indikator besarnya upaya pengarusutamaan gender di desa Gelangsar.

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah seberapa banyak program/kegiatan dan seberapa besar anggaran responsif gender yang dialokasikan dalam APBD Desa Gelangsar pada periode tahun 2017-2019. Analisis ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah desa maupun warga desa Gelangsar untuk mendorong pengarusutamaan gender di desa yang lebih besar ke depan.

DESA GELANGSAR SELAYANG PANDANG

Gelangsar adalah desa yang terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Gelangsar dikelilingi oleh Hutan Lindung Tubtuban di sebelah utara, desa Mekarsari di sebelah timur, desa Jeringo dan Mambalan di selatan, dan desa Dopang di sebelah barat. Dengan luas wilayah sebesar 1.900 Ha, Gelangsar secara administratif terbagi dalam 14 RT dalam cakupan 6 dusun.

Berdasarkan data di tahun 2019, jumlah penduduk Gelangsar mencapai 2.508 jiwa yang berada di dalam 941 KK dengan perbandingan jumlah perempuan lebih banyak (1.275 jiwa) dibandingkan laki-laki (1.233 jiwa). Berdasarkan data ini, kita dapat berkesimpulan bahwa perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki tidaklah terpaut jauh meski jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Dalam hal pendidikan, sebanyak 488 orang warga memiliki problem buta aksara dan huruf Latin. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan Desa Gelangsar karena terdapat warga berusia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah sebanyak 409 orang, dan warga berusia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat sebanyak 392 orang. Warga desa yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan SD/Sederajat berjumlah 320 orang, yang menamatkan SMP/Sederajat 272 orang dan SMA/Sederajat 225 orang. Saat ini, terdapat 28 warga desa yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi, baik di jalur diploma maupun strata I. Dapat disimpulkan, dalam hal pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit warga desa Gelangsar yang bersekolah.

Ketidakterediaan data pilah antara laki-laki dan perempuan dalam soal jenjang pendidikan membuat kita tidak dapat menarik kesimpulan perbedaan kondisi pendidikan di antara kedua kelompok tersebut.

Namun, berdasarkan data yang dirilis di dalam Sistem Informasi Desa Gelangsar (diakses pada Agustus 2019), terdapat 397 perempuan dan 354 laki-laki yang tidak/belum sekolah, 264 perempuan dan 226 laki-laki yang belum tamat SD/Sederajat, 354 perempuan dan 395 laki-laki yang tamat SD/Sederajat, 147 perempuan dan 146 laki-laki yang berada pada jenjang SMP/Sederajat, 69 perempuan dan 105 laki-laki yang berada di SMA/Sederajat. Sementara itu, hanya terdapat 7 orang perempuan dan 20 orang laki-laki yang sampai pada jenjang pendidikan tinggi, baik diploma maupun strata I.

Dengan demikian, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan, jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan dari tingkat paling dasar sampai tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Terdapat kesenjangan yang cukup mencolok, terutama pada jenjang SMA/Sederajat ke atas antara perempuan dan laki-laki. Hal ini, boleh jadi, memiliki keterkaitan erat jika dibuat perbandingan dengan data jumlah warga yang bekerja. Ada perbandingan yang linier dari sisi jumlah antara jenjang pendidikan perempuan (yang mayoritas rendah) dengan dengan pekerjaan perempuan (yang mayoritas tidak bekerja). Demikian pula sebaliknya, ada perbandingan linier antara pendidikan laki-laki (yang mayoritas lebih tinggi) dan pekerjaan laki-laki (yang lebih besar jumlahnya).

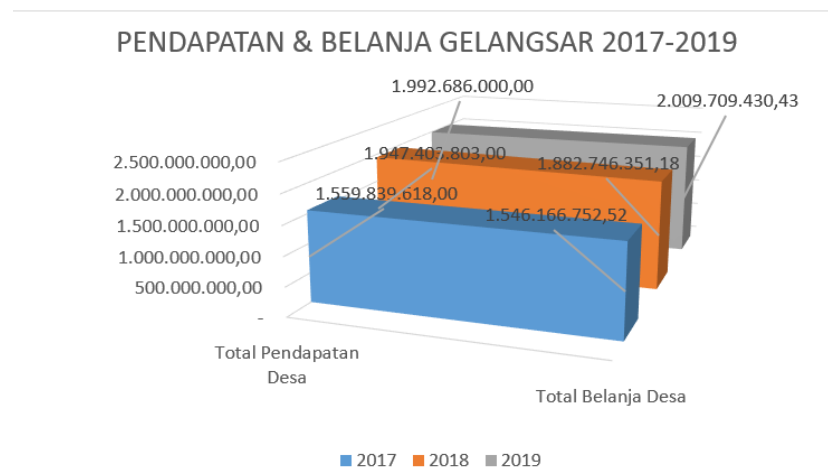
Dengan luas lahan yang sebagian besar adalah tanah perkebunan 633 ha/m², pekarangan 626 Ha/m², permukiman 39,2 ha/m², persawahan 25 ha/m², sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian mereka sebagai peternak (922 orang), buruh harian lepas (900 orang), tukang bangunan (480 orang), pengusaha kecil dan menengah (167 orang), petani (159 orang), buruh tani (95 orang), dan beberapa jenis pekerjaan dengan jumlah jiwa yang relatif kecil. Jika dibandingkan, terdapat 2,049 orang laki-laki dan 808 orang perempuan yang bekerja. Total warga desa yang bekerja adalah 2.857 orang. Dengan total jumlah penduduk 2.508 jiwa, diasumsikan bahwa 1 orang dapat memiliki lebih dari 1 jenis pekerjaan.

Berdasarkan data di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagian besar warga desa Gelangsar memanfaatkan lahan untuk beternak dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan untuk bertani atau berkebun. Di luar itu, sebagian besar lagi lebih memilih untuk bekerja pada orang lain sebagai buruh (baik buruh harian lepas, buruh tani, maupun tukang bangunan). Di sisi lain, kita juga melihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja terbilang sedikit dibanding laki-laki. Dengan mengasumsikan 1 orang memiliki lebih dari 1 jenis pekerjaan, dari 808 orang perempuan yang terdata memiliki pekerjaan, maka jumlah riil perempuan yang bekerja lebih sedikit dari 808 orang. Jumlah ini termasuk kecil jika dibandingkan total jumlah perempuan yang ada di desa Gelangsar (1.275 jiwa). Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan pula bahwa sebagian besar perempuan di desa Gelangsar menggantungkan kehidupannya dari orang lain karena tidak bekerja.

Dalam kelembagaan desa di tahun 2019, pemerintah desa memiliki 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki sebagai perangkat desa, dan 1 orang kepala desa laki-laki. Semua (6) dusun di Gelangsar dikepalai oleh laki-laki. Dari 9 orang pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, terdapat 2 orang perempuan. Di sisi lain, dari 8 orang pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdapat 2 orang perempuan. Dari 14 ketua RT, ada 2 orang perempuan. Berdasarkan data ini, kita melihat bahwa perempuan telah mulai mengambil peran di sejumlah kelembagaan strategis desa. Meski demikian, peran laki-laki masih dominan baik secara kuantitas maupun posisi strategis sebagai pimpinan kelembagaan.

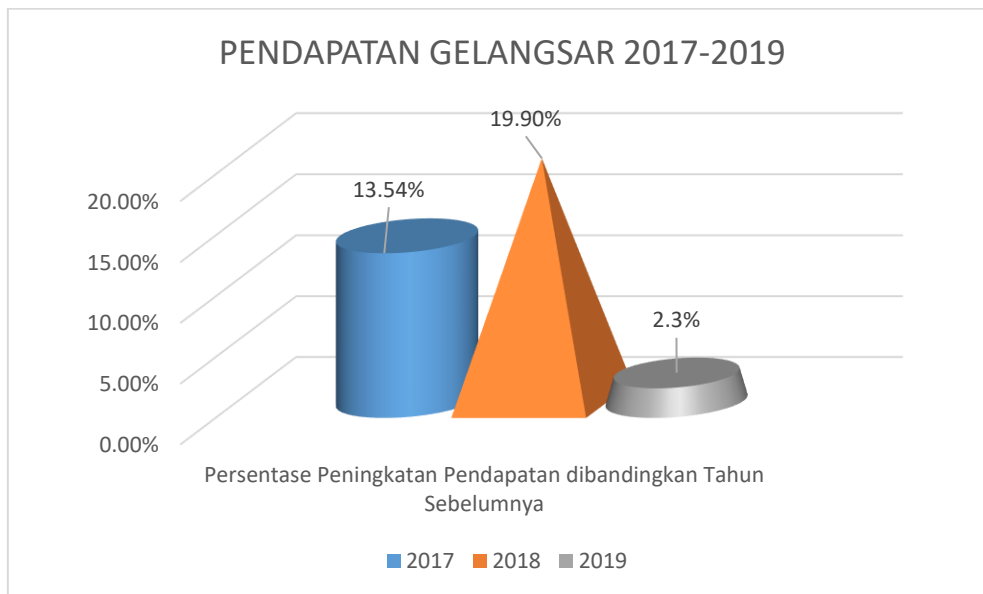
ANALISIS UMUM APBDESA GELANGSAR TAHUN 2017-2019

Dalam periode tahun 2017 hingga 2019, baik pendapatan maupun belanja desa Gelangsar selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pendapatan desa berjumlah Rp. 1.559.839.618 sementara belanja berjumlah Rp. 1.546.166.752,52. Jadi, belanja desa masih lebih kecil dari pendapatan. Sisa lebih tersebut dialokasikan sebagai tambahan penyertaan modal desa. Pada tahun 2018, pendapatan Gelangsar meningkat menjadi Rp. 1.947.407.803 dan belanja desa juga meningkat menjadi 1.882.746.351,18. Di tahun ini, belanja desa juga lebih kecil dibanding pendapatan dan sisa lebih tersebut digunakan sebagai tambahan penyertaan modal desa. Pada tahun 2019, pendapatan meningkat menjadi Rp. 1.992.686.000 dan belanja juga naik menjadi Rp. 2.009.709.430,43. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, pada tahun 2019, belanja desa dianggarkan lebih besar daripada pendapatan karena sisa kurang anggaran tersebut diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya.



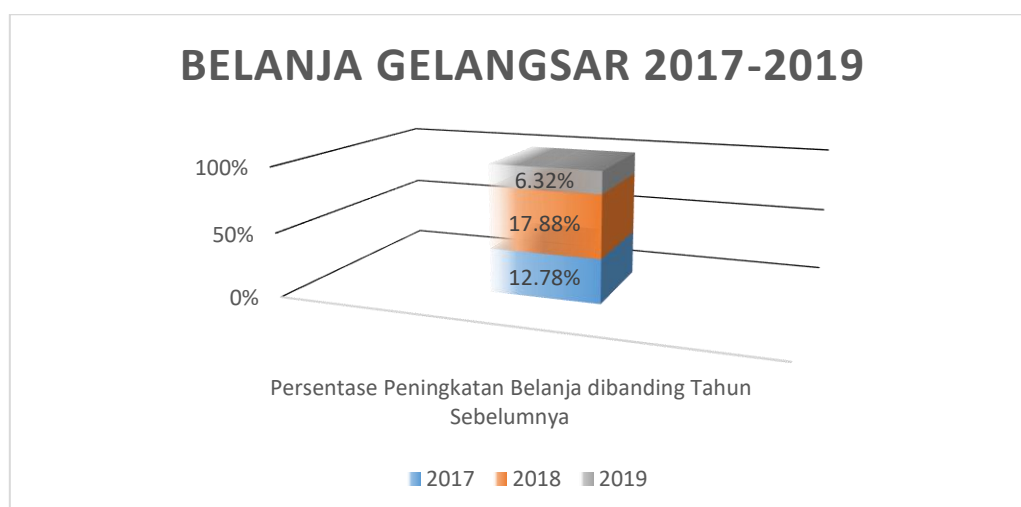
Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

Pendapatan Gelangsar, secara spesifik, meningkat sebesar 13,54 % pada tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya. Kecenderungan peningkatan ini semakin besar terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 19,90 % dibanding tahun 2017. Namun, kenaikan pendapatan merosot drastis secara persentase pada tahun 2019 dengan hanya 2,3 % peningkatan dibandingkan peningkatan di tahun 2018.



Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

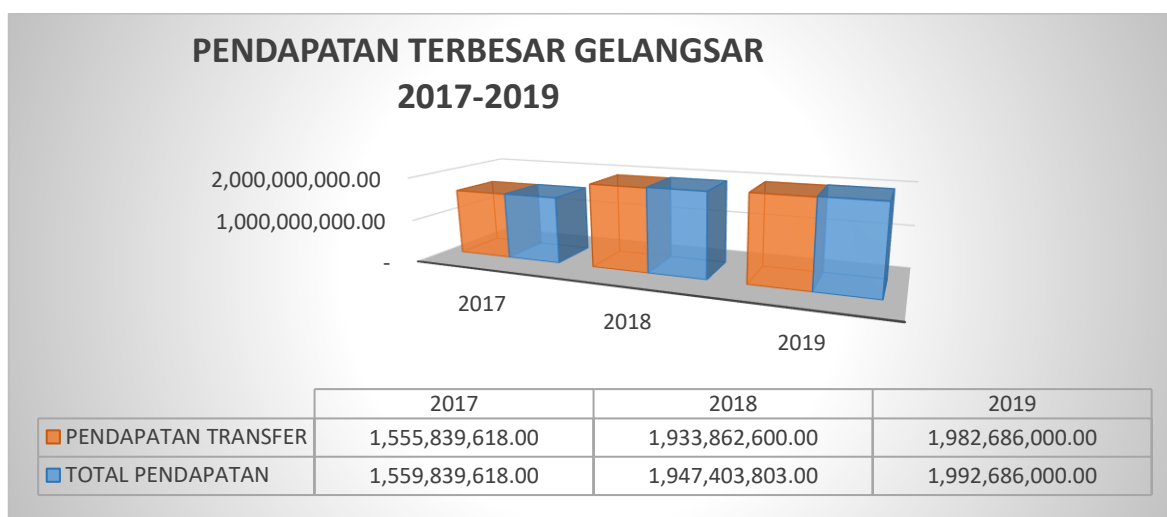
Demikian pula, dalam aspek belanja, peningkatan terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,78 % dibanding tahun 2016. Pada tahun 2018, peningkatan juga mencapai belasan persen seperti pada pos pendapatan, yakni 17,88 % dibandingkan belanja pada tahun 2017. Dan mirip seperti pada pos pendapatan, di tahun 2019, hanya sedikit terjadi peningkatan belanja dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 6,32 % dibanding tahun 2018.



Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

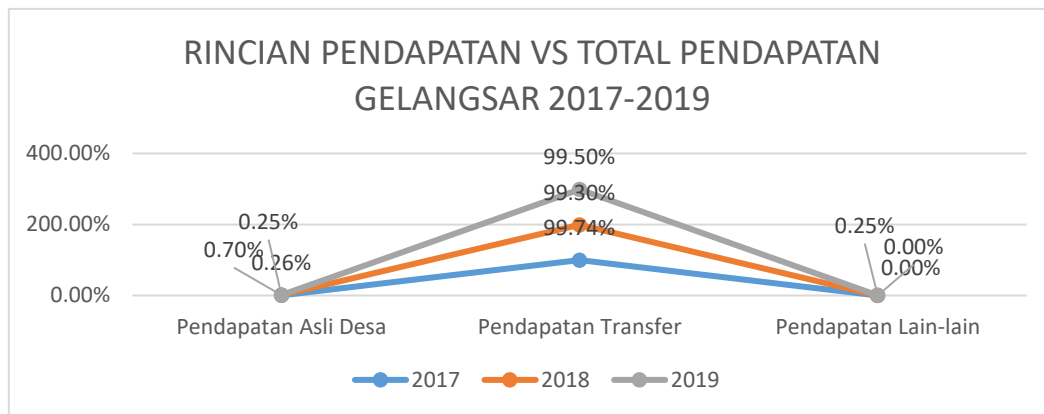
Baik di tahun 2017, 2018, maupun 2019, sumber pendapatan terbesar desa Gelangsar masih disumbang oleh pendapatan transfer. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten menjadi komponen pendapatan transfer.

Pendapatan transfer pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.555.839.618 dari total Rp. 1.559.839.618. Dana Desa pada tahun ini mencapai Rp. 875.203.600 atau 56,11 % dari total pendapatan, sementara ADD sebanyak Rp. 639.823.518 atau 41,02 % dari total pendapatan. Pendapatan transfer pada tahun 2018 adalah Rp. 1.933.862.600 dari total Rp. 1.947.403.803. Dana Desa masih menjadi komponen terbesar yakni Rp. 1.179.409.000 atau 60,56 % dari total pendapatan dan ADD sebesar Rp. 681.392.000 atau 34,99 % dari total pendapatan. Di tahun 2019, pendapatan transfer mencapai Rp. 1.982.686.000 dari total Rp. 1.992.686.000. Lagi-lagi, Desa tetap menjadi komponen pendapatan transfer terbesar yakni 61,63 % dari total pendapatan atau Rp. 1.228.013.000 dan ADD sebesar Rp. 697.823.000 atau 35,02 % dari total pendapatan.



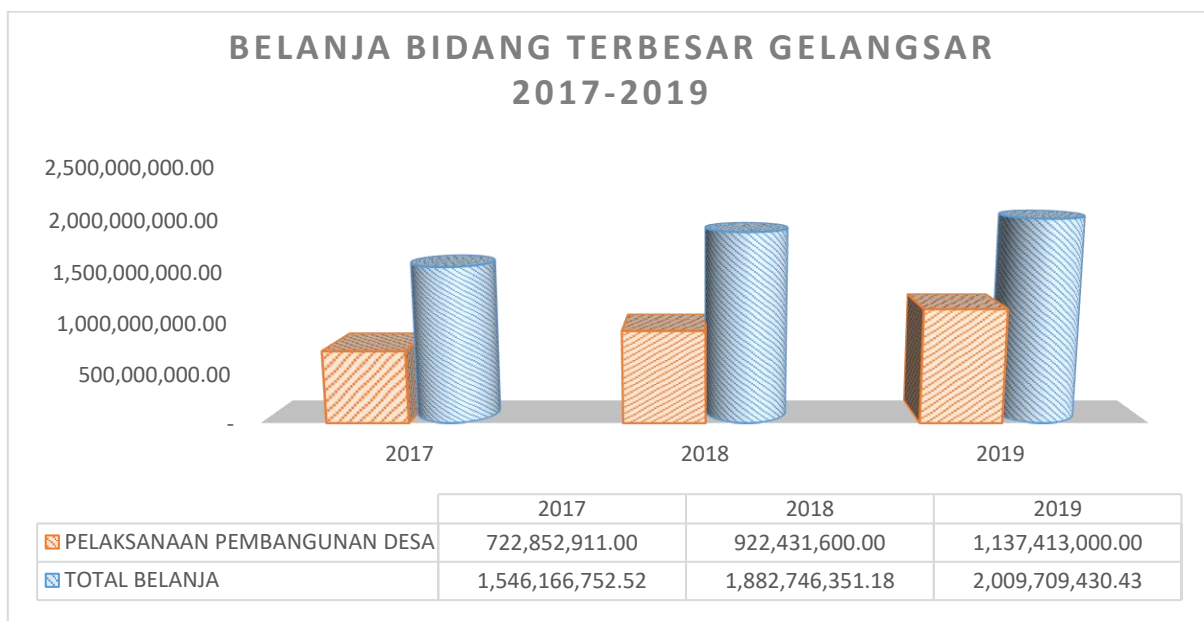
Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

Rata-rata, pendapatan transfer hanya berselisih sedikit dari total pendapatan. Hal ini disebabkan karena jumlah pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain berkisar pada 0,26 % di tahun 2017, 0,70 % di tahun 2018, dan 0,50 % di tahun 2019 dibandingkan total pendapatan. Sementara itu, persentase pendapatan transfer dibanding total pendapatan sangatlah signifikan, yakni 99,74 % (2017), 99,30 % (2018), dan 99,50 % (2019).



Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

Dalam pos belanja, sejak tahun 2017 sampai 2019, pembelanjaan desa terbesar berada pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Belanja bidang ini mencapai Rp. 722.852.911 atau sebesar 46,75 % % dari total Rp. 1.546.166.752,52 pada tahun 2017. Di tahun berikutnya, belanja bidang ini meningkat menjadi Rp. 922.431.600 atau 48,99 % dari total Rp. 1.882.746.351,18. Peningkatan pun terjadi di tahun 2019 yakni menjadi Rp. 1.137.413.000 atau 56,60 % dari total Rp. 2.009.709.430,43.



Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

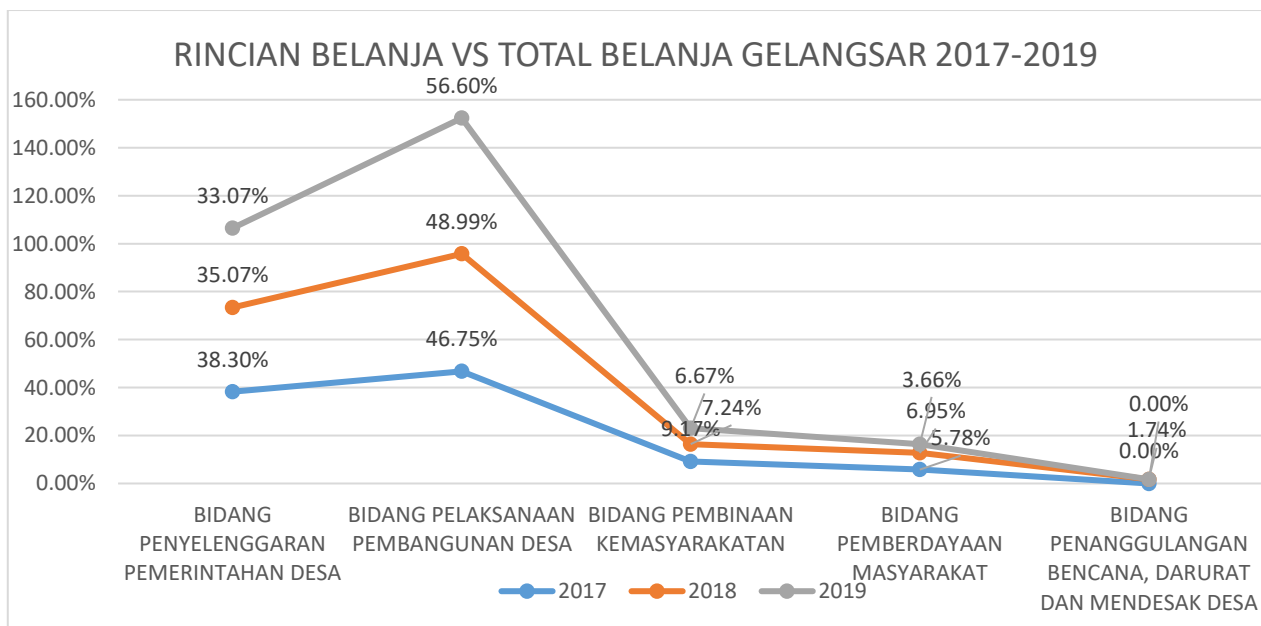
Sementara itu, belanja bidang terkecil di semua tahun berada pada Bidang Tidak Terduga/Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, disusul Bidang Pemberdayaan Masyarakat di urutan kedua terbawah, Pembinaan Kemasyarakatan di urutan ketiga dari bawah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di urutan kedua dari atas.

Pada pos belanja kegiatan, Belanja Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapat porsi pertama terbesar di tahun 2017 yakni 43,42 % dari total belanja atau Rp. 671.422.411 dan disusul Belanja Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala&Perangkat Desa di urutan kedua sebesar 23,21 % dari total belanja atau Rp. 358.862.000. Di tahun 2018, belanja kegiatan masih didominasi Pembangunan Jalan dan Jembatan tetapi dengan persentase dan jumlah rupiah yang menurun

yakni 33,86 % dari total belanja atau Rp. 637.554.500 dan masih disusul Belanja Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala&Perangkat Desa sebesar 17,10 % dari total belanja atau Rp. 321.950.000, juga dengan persentase dan jumlah rupiah yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tahun 2019, meski dengan kategori pos belanja yang berubah, porsi anggaran untuk Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan masih tetap yang terbesar. Ada 3 pos belanja kegiatan yang menggunakan nama "Jalan dan Jembatan" yakni Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan DII), dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa. Jika ditotal, persentasenya menjadi 42,68 % dari total belanja atau Rp. 857.755.000; meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya baik dari sisi jumlah belanja maupun persentase.

Di sisi lain, pos belanja yang berkaitan dengan penghasilan tetap dan tunjangan kepala&perangkat desa, seperti tahun-tahun sebelumnya berada pada posisi kedua terbesar belanja. Meski juga berbeda kategori pos belanja dibanding tahun sebelumnya, ada 3 kegiatan yang berkaitan dengan "Penghasilan Tetap dan Tunjangan" yakni, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, dan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Total belanja dalam kelompok ini adalah Rp. 290.462.000 atau 14,45 % dari total belanja; menurun dibandingkan tahun sebelumnya baik dari sisi jumlah maupun persentase.



Sumber : APBDesa Gelangsar 2017-2019

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER ATAS APBDESA GELANGSAR 2017-2019

Pembiayaan pelaksanaan PUG dalam konteks penganggaran desa (juga) termaktub dalam 3 jenis anggaran responsif gender, yakni belanja khusus gender, belanja tindakan afirmasi dan penguatan kapasitas, dan belanja pengarusutamaan. Belanja khusus gender adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki.

Belanja tindakan afirmasi dan penguatan kapasitas adalah alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas perempuan di jabatan publik, dan belanja untuk memperkuat prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk pengembangan kapasitas pemerintah, pengadaan data pilah dan kordinasi lintas sektor. Sementara itu, belanja pengarusutamaan adalah alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender dalam semua sektor yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan dan ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender.

Analisis APBDesa ini berupaya mengidentifikasi dan menghitung seberapa banyak belanja program/kegiatan dalam APBDesa Gelangsar pada periode tahun 2017-2019 yang masuk dalam ketiga kategori anggaran responsif gender di atas dan seberapa besar jumlahnya dari total belanja. Berdasarkan analisis ini, kita dapat melihat tren perkembangan jumlah belanja anggaran responsif gender di Desa Gelangsar. Hasil analisis ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah dan warga desa Gelangsar untuk mendorong perluasan praktek pengarusutamaan gender di dalam pembangunan desa, terutama dalam hal penganggaran.

Berdasarkan rekapitulasi APBDesa Gelangsar periode Tahun 2017-2019, alokasi anggaran responsif gender di desa Gelangsar adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					
	2017	%	2018	%	2019	%
TOTAL BELANJA DESA	1.546.166.752,52		1.882.746.351,18		2.009.709.430,43	
Anggaran Spesifik/Khusus Gender						
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	43.129.000,00	2,79%	25.440.000,00	1,35%		
Pembinaan PKK					24.240.000,00	1,21%
Anggaran Afirmatif Gender						
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					15.958.500,00	0,79%
Anggaran Mainstreaming/Pengarusutamaan Gender						
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	20.775.000,00	1,34%	19.239.500,00	1,02%		
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	30.655.500,00	1,98%	61.155.000,00	3,25%		
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	18.526.500,00	1,20%	46.276.000,00	2,46%		
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	10.300.000,00	0,67%	50.000.000,00	2,66%		
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	5.250.000,00	0,34%	0	0,00%		
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Masyarakat	1.800.000,00	0,12%	1.800.000,00	0,10%		
Kegiatan Fasilitasi bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan Anak Yatim	2.700.000,00	0,17%	3.300.000,00	0,18%		
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat					4.613.000,00	0,23%
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi					3.300.000,00	0,16%
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insektif, KB, dsb)					1.200.000,00	0,06%
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insektif)					41.515.500,00	2,07%

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					7.200.000,00	0,36%
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD					3.750.000,00	0,19%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD					2.000.000,00	0,10%
TOTAL ANGGARAN RESPONSIF GENDER	133.136.000,00	8,61%	207.210.500,00	11,01%	103.777.000,00	5,16%

Pada tahun 2017, total anggaran responsif gender desa Gelangsar berjumlah 133.136.000 rupiah atau sebesar 8,61% dari keseluruhan belanja pada tahun tersebut. Jumlah ini paling besar disumbang oleh Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebagai anggaran khusus gender sebesar 2,79% dari total belanja. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan menyumbang anggaran responsif gender pada urutan kedua, yakni sebanyak 1,98% dari total belanja. Sementara itu, pos terkecil yang masuk dalam anggaran responsif gender di tahun 2017 adalah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Masyarakat, yakni sebesar 0,12% dari total belanja.

Di tahun 2018, terjadi peningkatan anggaran responsif gender sebesar 74.074.500 rupiah. Dibandingkan total belanja, yang juga meningkat, anggaran responsif gender berjumlah 11,01%. Penyumbang terbesar anggaran responsif gender adalah Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan yang berjumlah 3,25% dari total belanja dan di urutan kedua adalah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang menyumbang 2,66% dari total belanja. Sementara itu, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Masyarakat masih menjadi pos anggaran terkecil dalam anggaran responsif gender yakni sebesar 0,10% dari total belanja.

Penurunan angka anggaran responsif gender terjadi di tahun 2019. Jika di tahun 2018, anggaran responsif gender berjumlah 207.210.500 rupiah, di tahun 2019 menurun menjadi 103.777.000 rupiah atau turun sebesar 103.433.500 rupiah. Dibandingkan dengan total belanja, yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran responsif gender turun menjadi 5,16%. Peringkat pertama penyumbang anggaran responsif gender di tahun ini adalah Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebanyak 2,07% dan penyumbang terkecil adalah Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) sebesar 0,06%.

Dengan demikian, secara umum anggaran responsif gender di desa Gelangsar dalam pada periode tahun 2017-2019 dapat dikatakan mengalami fluktuasi, kenaikan dan penurunan dari aspek kuantitas. Jika dibandingkan total belanja anggaran, anggaran responsif gender dalam periode 3 tahun anggaran masih terbilang kecil. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2018 dan paling besar disumbang oleh kegiatan pembangunan fisik.

Meski demikian, dari sisi kualitas (alokasi kegiatan), kita dapat melihat peningkatan atau kemajuan terutama di tahun 2019. Salah satu hal penting yang patut dicatat dalam APBDesa Gelangsar pada tahun 2019 adalah adanya anggaran yang dialokasikan untuk Anggaran Afirmatif. Jika di APBDesa periode 2 tahun sebelumnya, pos anggaran afirmatif ini tidak muncul, di tahun 2019 pemerintah dan warga desa mengalokasikannya dalam bentuk Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan yang berjumlah cukup besar yakni 15.958.500 rupiah dibandingkan dengan pos anggaran responsif gender lain.

Dalam periode APBDesa di Gelangsar ke depan, di tahun-tahun mendatang, kita berharap kemajuan yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Alokasi-alokasi kegiatan yang lebih mengarah pada ketiga aspek anggaran responsif gender – spesifik/khusus, afirmatif dan *mainstreaming*/pengarusutamaan gender – dapat diperbanyak jumlah dan juga alokasi anggarannya.